

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kepala sekolah merupakan penentu utama sebuah sekolah atau lembaga menjadi berhasil, karena kesuksesan tercapainya tujuan dan kualitas sekolah begitu dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah.¹ Kepala sekolah dalam skala kecil memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah secara langsung.² Kepala sekolah juga mengemban amanah untuk membawa lembaga yang dipimpin agar mampu mencetak lulusan yang diharapkan oleh tujuan pendidikan yakni tidak hanya berkualitas dari segi pengetahuan, akan tetapi juga memiliki nilai sikap yang baik dan keterampilan mumpuni. Maka dalam hal ini sudah menjadi tugas utama kepala sekolah dalam mewujudkannya dengan pengelolaan yang baik.

Mengelola pendidikan sangat membutuhkan pemikiran dan analisis mendalam guna terlaksananya pendidikan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mengelola pendidikan bukanlah perkara yang mudah. Artinya, begitu urgen peran pemimpin pendidikan dalam rangka terwujudnya pencapaian tujuan pendidikan. Pemimpin pendidikan sebagai pimpinan tertinggi dalam sebuah

¹ Ilham, "Kebijakan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar," *Ainara Journal* Vol. 2, No. 3 (Agustus, 2021):155.

² Jidan, "Kebijakan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Terhadap Perspektif Pembinaan SMAN 2 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi," *Bikons* Vol.2, No.2 (Agustus, 2022): 45.

lembaga pendidikan diharuskan bisa memformulasikan dan dengan jelas menyampaikan visi dan misi demi kemajuan pendidikan. Pemimpin pendidikan memiliki peran yang semakin luas dan rumit. Lembaga pendidikan dalam terwujudnya proses perubahan membutuhkan pemimpin pendidikan mesin penggerak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian rasa dipercaya dan kewenangan kepada setiap pegawai lembaga pendidikan.³ Kepala sekolah dan kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan tidak hanya dituntut bisa memimpin akan tetapi juga diharuskan dapat mengerahkan segala upaya dengan kecerdasan dan usahanya untuk kemajuan lembaga yang dipimpinnya. Tidak sekedar membentuk visi dan misi yang baik, namun pencapaian visi dan misi yang tepat dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada generasi.

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang menjadi keputusan resmi organisasi, sifatnya mengikat, pengatur perilaku dalam rangka terciptanya tata nilai baru dalam masyarakat yang menjadi tujuan.⁴ Kebijakan dapat juga diartikan dengan inteligensi, keputusan, kecakapan serta kebijaksanaan. Selain itu, kebijakan sebagai suatu rencana dasar dalam melaksanakan pekerjaan, dapat pula digunakan dalam melakukan tindakan dan pemberian keputusan yang telah disepakati yang dilakukan kepemimpinan di pemerintahan, serta berguna dalam perancangan pernyataan cita-cita yang dituju dari suatu organisasi, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, asas

³ Umar Sidiq dan Khoirussalim, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2021), 1.

⁴ Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia," *Alim Journal of Islamic Educatioan* Vol. 3, No. 2 (2021): 200.

sebagai petunjuk demi tercapainya kesesuaian dan ketepatan harapan berdasarkan sasaran.⁵ Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang berkaitan dengan ranah pendidikan dalam proses penguraian visi misi pendidikan dengan langkah strategis guna mencapai tujuan pendidikan.⁶ Dalam hal ini kebijakan yang akan diambil oleh seorang kepala sekolah atau kepala madrasah haruslah selaras pula dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan kurikulum nasional yakni kurikulum merdeka yang memiliki Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P-5/PPRA). Tentu dengan berbagai perubahan yang terjadi, terutama dalam perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka maka pentinglah kepala sekolah memiliki kemampuan dalam menjalaninya dengan pengetahuan sehingga lahir kebijakan yang akan mendukung tercapainya visi dan misi sekolah yang menjadi tujuan yang akan dicapai.

Sebagaimana kebijakan nasional dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) adalah muncul akibat maraknya paham radikalisme yang menjangkiti lembaga-lembaga pendidikan, dan siswa sebagai bagian penting dari lembaga pendidikan seringkali menjadi sasaran. Hal tersebut didukung oleh berita dari detik news pada 6 Juli tahun 2023 lalu berdasarkan pernyataan Bapak Mahfud

⁵ Anesti Rohma Wardani, Farid Setiawan, Moh Rifki, Nadzif Nafi' Dinulloh, Indo Ahya Maulana, Nur 'aini Zahro, Hafizh Ananda Rizkilla, Nurul Khiyaroh, "Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Education and development* Vol.10, No.3 (September, 2022): 89.

⁶ Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, Nurhizrah Gistituati, "Konsep dasar kebijakan pendidikan" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol. 6, No. 1 (2021): 68.

bahwa radikalisme terus berkembang di Lembaga Pendidikan. Maka diantara solusinya dengan diterapkannya kurikulum merdeka khususnya pada penerapan P-5/PPRA baik di sekolah maupun di Madrasah. Maka penting adanya kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA.

Profil pelajar Pancasila adalah bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila memiliki peran sebagai rujukan utama yang memberikan arah seluruh kebijakan pendidikan sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pendidik dalam rangka pembangunan karakter serta kemampuan peserta didik. Profil pelajar Pancasila dengan perannya yang urgen seharusnya bisa dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Profil ini diperlukan hal yang simple, dapat dengan mudah diingat dan dijalankan baik oleh guru maupun siswa agar berlangsung dalam aktivitas harian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.⁷

Tidak berbeda dengan sekolah secara umum, sekolah umum berciri khas agama seperti madrasah pun juga memiliki konsekuensi mengikuti kebijakan kemendikbudristek, tentu dengan adanya penyesuaian dengan karakteristik, kekhasan, dan kebutuhan madrasah. Pengintegrasian nilai-

⁷ Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, *Dimensi, Elemen, dan Subelemen profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum, Merdeka* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022), 2.

nilai agama Islam dalam penyusunan kurikulum untuk menumbuhkan jati diri dan kekhasan madrasah. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pola pikir, pola sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi pendidikan dengan kebijakan dan praktik pendidikan di madrasah menjadikan nilai-nilai agama sebagai hal yang mewarnainya. Maka di madrasah pun terdapat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) yang dikembangkan dari Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.⁸

Berdasarkan salinan lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Struktur kurikulum untuk SMA/MA terbagi menjadi 2 (dua) yakni pembelajaran intrakurikuler; dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% (tiga puluh persen) total JP per tahun.⁹

Peraturan diatas menjelaskan bahwa keberadaan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh SMA dan MA terdiri dari pembelajaran siswa di lembaga pendidikan sejalan dengan komponen kurikulum dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Artinya, menjadi hal yang wajar

⁸ Direktur KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI, *Panduan pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*, (Direktur Jenderal, 2022), iv.

⁹ *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. (Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022), 13.

jika sekolah dengan kurikulum merdeka yang diterapkan menerapkan P-5/PPRA. Maka pemimin lembaga pendidikan baik SMA maupun MA memiliki konsekuensi menerapkannya dikarenakan telah menjalankan kurikulum merdeka.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ^w

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (TQS. Al-Anbiya’ [21]: 107)¹⁰

“Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, “Melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam,” bangsa manusia dan jin karena keberadaanmu.¹¹ Hal ini menjelaskan bahwa hadirnya Islam yang dibawa oleh utusan Pencipta bukanlah sekedar rahmat bagi pemeluknya saja, melainkan bagi seluruh dunia. Sebagaimana dalam memenuhi amanat kebijakan pendidikan nasional dalam mencetak profil pelajar pancasila untuk sekolah umum dan kekhasan profil pelajar rahmatan lil alamin yang harus juga dicetak dalam pendidikan madrasah. Seorang pemimpin lembaga pendidikan harus mampu memberikan kebijakan yang menuntun pada tercapainya nilai universal Islam yakni bagi seluruh manusia. Semua itu bisa terealisasi dan ditetapkan oleh kepala sekolah dan madrasah berdasarkan kebijakannya dalam menjalankan kepemimpinan di lembaganya. Maka kebijakan dalam menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah menjadi tanggung jawab dan akan berjalan sesuai arahan

¹⁰ Qur’an Kemenag In Word.

¹¹ Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Sukoharjo: Ummul Qura, 2017), 331.

kepala sekolah. Begitu pun Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) di madrasah pun menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan akan terlaksana berdasarkan pertimbangannya. Dari kedua proyek pendidikan ini memiliki persamaan, namun di madrasah memiliki kekhasan yang harus dipertahankan yakni nilai-nilai Islam. Dari sinilah muncul ketertarikan dan hal unik yang harus kami teliti dalam hal pengambilan dan keputusan kebijakan pemimpin lembaga pendidikan yakni sekolah dan madrasah dalam pengimplementasian P5 dan P5-PPRA. Dengan berbagai tantangan permasalahan yang harus dihadapi di dalam diri setiap siswa, tentu membutuhkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional tanpa mengabaikan perbaikan hasil pembelajaran dan pembentukan karakter siswa.

Sebagaimana dari pernyataan Ibu Meylina Tripurwani, S.Pd. selaku Waka Kurikulum di MAN 2 Pamekasan bahwa dalam menerapkan proyek P-5/PPRA penting adanya kebijakan dari kepala kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan P5. Kemudian waka kurikulum mengajukan tema kepada kepala sekolah barulah kemudian waka kurikulum membentuk tim fasilitator.¹² Ditegaskan pula kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan P5 dalam pernyataan salah satu koordinator P5 di SMAN 2 Pamekasan, Ibu R.A. Febiyanti Handayani, S.Pd., bahwa dari awal yang

¹² Meylina Tripurwani, Waka Kurikulum MAN 2 Pamekasan, *Wawancara Langsung* (31 Januari 2024).

menentukan sekolah akan mandiri belajar adalah kepala sekolah. Jelas P5 harus dilaksanakan karena itu amanat dari kurikulum, sehingga bagaimana pun P5 harus diatur. Tentu hal itu merupakan kebijakan dari kepala sekolah yang kemudian teknisnya ke bawah. Dan pertimbangan pelaksanaan P5 disesuaikan dengan karakter sekolah yang mana tentunya berdasarkan hasil musyawarah antara kurikulum dengan kepala sekolah. Pasti dalam semua keputusan, kepala sekolah harus terlibat di dalamnya. Setidaknya memberikan pertimbangan dari segi kelebihan dan kelemahan dari apa yang akan diterapkan dalam implementasi P5.¹³

Maka dalam hal ini dikarenakan pentingnya penerapan kebijakan setiap lembaga pendidikan baik oleh kepala sekolah dan madrasah, sedangkan tidak semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka, maka sangat perlu dilakukan penelitian terkait kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA di SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan yang telah menerapkan kurikulum merdeka dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P-5/PPRA).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA?

¹³ R.A. Febiyanti Handayani, Koordinator P5 di SMAN 2 Pamekasan, *Wawancara Langsung* (31 Januari 2024).

2. Apa saja hambatan kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA?
3. Bagaimana kelebihan dari kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA.
3. Untuk mendeskripsikan kelebihan dari kebijakan kepala SMAN 2 Pamekasan dan MAN 2 Pamekasan dalam menerapkan P-5/PPRA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi kepala sekolah dan madrasah di SMA dan di MA, yakni sebagai acuan dalam memutuskan kebijakan penggunaan kurikulum merdeka dengan menerapkan P-5/PPRA.
2. Bagi guru di sekolah dan madrasah, yakni sebagai gambaran dalam melaksanakan pembelajaran dengan P-5/PPRA.
3. Bagi siswa, yakni sebagai pelaksana P-5/PPRA.
4. Bagi dinas dan kementerian, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan dan pengembangan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA dan MA.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, agar pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dapat memiliki kesamaan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun beberapa istilah tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya).¹⁴
Dalam hal ini adalah keputusan yang diambil kepala SMAN 2 Pamekasan dan kepala MAN 2 Pamekasan.
2. Kepala sekolah adalah orang (guru) yang memimpin suatu sekolah.¹⁵
Dalam hal ini Drs. Ali Umar Arhab, M.Pd., selaku kepala SMAN 2 Pamekasan.
3. Kepala madrasah adalah orang (guru) yang memimpin suatu sekolah Islam atau madrasah. dalam hal ini, Bapak Dr. Mohammad Holis, S. Ag., M.Si selaku kepala MAN 2 Pamekasan
4. P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) adalah proyek kebijakan untuk sekolah “SMA”.
5. P5-PPRA (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin) adalah proyek kebijakan untuk madrasah “MA”.

¹⁴ KBBI daring (diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 09.23 WIB).

¹⁵ KBBI daring (diakses pada tanggal 19 Februari 2024, pukul 09.25 WIB).

F. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang ditulis oleh Rizka Yuhda Rohmah, “Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 2 Batu Malang.”

Hasil penelitian ini adalah: 1) Perencanaan kurikulum merdeka belajar untuk penguatan profil pelajar Pancasila diawali dengan sosialisasi dan perencanaan kurikulum, dibentuk tim fasilitasi sebagai penyusun LKPD (lembar kerja peserta didik), dan modul proyek berdasarkan kondisi lingkungan. 2) Pelaksanaan P5 dengan penggunaan penentuan waktu satu pekan di bulan terakhir setiap bulannya secara penuh, penerapannya terdiri atas empat tahapan yakni tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata dan tindak lanjut. Guru dan masyarakat memiliki peran sebagai fasilitator serta pengawas utama dengan memberikan pengarahan kepada peserta didik sebagai tugasnya, penerapan proyek membutuhkan pula peran masyarakat sebagai sumber belajar dan memberikan bantuan kepada peserta didik dalam rangka menemukan atau menentukan identitas keberadaan suatu isu. 3) Hasil dari penerapan itu tentang laporan yang disusun dalam bentuk proposal oleh peserta didik. Selain itu, dokumentasi berupa foto dan video diunggah ke google drive dari setiap implementasi proyek peserta didik. Selanjutnya, pembuatan rangkuman dari semua dimumentasi oleh lembaga pendidikan untuk di-*upload* di platform YouTube. Selain itu, adanya rapat yang merupakan hasil penyusunan laporan hasil

implementasi projek peserta didik oleh lembaga. Pengevaluasian keberhasilan pelaksanaan kurikulum dan perbaikan atau peningkatan area dengan pengidentifikasian. Hal ini akan memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum selanjutnya dan kepastian pengaruh dari kurikulum merdeka belajar.¹⁶

Tesis ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu juga sama-sama membahas tentang penguatan profil pelajar pancasila di SMA. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang akan diteliti adalah terletak pada jenis kualitasnya jenis pendekatan kualitatif studi kasus dengan instrumental kolektif. Perbedaan juga terletak pada fokus penelitian. Penelitian akan fokus pada kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P5 di salah satu SMA dan P5-PPRA di salah satu MAN.

2. Tesis yang ditulis oleh Ridya Ningrum Wulandari, “Analisis Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di SD ‘Aisyiyah Kota Malang.’”

Hasil penelitian ini adalah: 1) penerapan komunikasi sudah sangat baik antar warga sekolah dalam pelaksanaan kebijakan, kualifikasi SDM bagus dan sarana dan prasarana sudah sangat baik, sikap penerimaan dan pelaksanaan kebijakan sangat baik, dan struktur

¹⁶ Rizqa Yuhda Rohmah, “Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 2 Batu Malang” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 134-136.

cara kerja dalam menjalankan tugas sudah baik, serta memiliki SOP P5 sesuai kurikulum merdeka yang diterapkan di kelas I dan IV. 2) Faktor pendukung penerapan P5 berasal dari kerjasama dukungan. Hambatan minimnya sumber rujukan terkait P5 dari pemerintah. Dan 3) Hasil dari pelaksanaan P5 modul ajar disusun berdasarkan tujuan pembelajaran proyek. Kemudian, perwujudan proyek Pelajar Pancasila dengan 6 aspek dalam pembelajaran kokurikuler sekolah.¹⁷

Tesis ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian sama-sama membahas tentang penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang akan diteliti adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian akan fokus pada kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P5 di salah satu SMA dan P5-PPRA di salah satu MAN.

3. Tesis yang ditulis oleh Rosyida Rahmatul Haq, “Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan Lil 'Alamin* dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus di MAN 1 Nganjuk).”

Hasil penelitian ini adalah: 1) perencanaan penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan*

¹⁷ Ridya Ningrum Wulandari, “Analisis Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di SD ‘Aisyiyah Kota Malang’ (Tesis, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2023), 38.

Lil'alamin dalam kearifan lokal di MAN 1 Nganjuk mempunyai tahapan-tahapan yang terdiri dari: pembentukan tim fasilitator; pengidentifikasian terhadap kebutuhan dan kesiapan madrasah; perancangan dimensi, nilai, tema, dan alokasi waktu; menyusun modul proyek; dan merancang strategi pelaporan proyek. 2) Implementasi P5-PPRA dalam kearifan lokal di MAN 1 Nganjuk menggunakan alokasi waktu 10 hari dengan tahapan penerapannya yakni tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, refleksi dan tindak lanjut. 3) Terdapat empat fokus evaluasi pengelolaan P5-PPRA dalam Kearifan Lokal di sekolah tersebut yaitu evaluasi konteks, input, proses, dan produk program. Bentuk instrumen penilaiannya dengan tes tulis/lisan, ceklis observasi, rubrik penilaian kinerja, penilaian hasil proyek. Selain itu, pelaksanaannya telah berjalan dengan baik sesuai rencana.¹⁸

Tesis ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian sama-sama membahas tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) di MAN. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan yang akan diteliti adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian akan fokus pada kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P5 di salah satu SMA dan P5-PPRA di salah satu MAN.

¹⁸ Rosyida Rahmatul Haq, "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus di MAN 1 Nganjuk)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024), 105-106.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rizka Yuhda Rohmah, "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMAN 2 Batu Malang."(2023)	Penelitian kualitatif. Sama-sama membahas tentang P5.	Jenis pendekatan kualitatif studi kasus dengan instrumental kolektif. Dan berbeda dalam fokus penelitian yakni mengenai kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA.
2	Ridya Ningrum Wulandari, "Analisis Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di SD 'Aisyiyah Kota Malang.'"(2023)	Penelitian kualitatif. Sama-sama membahas tentang P5	Jenis pendekatan kualitatif studi kasus dengan instrumental kolektif. Dan berbeda dalam fokus penelitian yakni mengenai kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerapkan P-5/PPRA.
3	Rosyida Rahmatul Haq, "Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil 'Alamin dalam Kearifan Lokal (Studi Kasus di MAN 1 Nganjuk)." (2024).	Penelitian kualitatif. Sama-sama membahas tentang P-5/PPRA	Jenis pendekatan kualitatif studi kasus dengan instrumental kolektif. Dan berbeda dalam fokus penelitian yakni mengenai kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam

		menerapkan P-5/PPRA.
<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang P-5/PPRA. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada jenis pendekatan kualitatif studi kasus dengan instrumental kolektif dan penelitian ini lebih fokus pada kebijakan kepala sekolah dan madrasah dalam menerakan P-5/PPRA.</p>		